

“

"Pertumbuhan tanpa keadilan melahirkan ketimpangan, kekuasaan tanpa akuntabilitas melahirkan dominasi. Ekonomi politik adalah kunci memahami dunia yang sedang berubah."

”

5.11%
8.25%
0.363 GDP



PERTUMBUHAN
PENDORONG KEMAKMURAN



KEKUASAAN
PENENTU ARAH DAN ATURAN



KETIMPANGAN
TANTANGAN KEADILAN

EKONOMI POLITIK KONTEMPORER

ANTARA PERTUMBUHAN, KETIMPANGAN, DAN KEKUASAAN

OLEH

RUDY C TARUMINGKENG



PERSPEKTIF GLOBAL
Memahami dinamika ekonomi, geopolitik, dan institusi dunia.



ANALISIS MENDALAM
Membedah hubungan pertumbuhan, ketimpangan, dan kekuasaan.



BERORIENTASI PADA MANUSIA
Menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan.



RELEVAN UNTUK MASA DEPAN
Merancang peluang dan risiko teknologi, AI, dan transformasi ekonomi.

MEMBACA MASA KINI • MEMAHAMI KEKUASAAN • MERANCANG MASA DEPAN

Rudy C Tarumingkeng: ***Ekonomi Politik Kontemporer: Antara
Pertumbuhan, Ketimpangan, dan Kekuasaan***

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

8 April 2026

Ekonomi.Politik.Kontemporer-
Antara.Pertumbuhan.Ketimpangan.dan.Kekuasaan

EKONOMI POLITIK KONTEMPORER: ANTARA PERTUMBUHAN, KETIMPANGAN, DAN KEKUASAAN

Abstrak

Makalah ini membahas ekonomi politik kontemporer sebagai medan analisis yang mempertemukan pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan relasi kekuasaan. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa pertumbuhan tidak pernah bersifat netral; ia selalu dibentuk oleh institusi, pilihan kebijakan, struktur pasar, teknologi, dan konfigurasi kekuasaan nasional maupun global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami perlambatan pertumbuhan, meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, menguatnya geoeconomics, pemusatan kuasa dalam ekonomi digital, serta tekanan yang serius terhadap demokrasi dan pembangunan manusia. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, sementara WTO memperkirakan volume perdagangan barang dunia pada 2025 dapat berkontraksi 0,2 persen akibat tarif tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Pada saat yang sama, UNDP melaporkan bahwa kenaikan HDI global berada pada laju terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu, dan V-Dem menunjukkan bahwa 74

persen populasi dunia kini hidup dalam rezim autokratis. Di tengah transformasi digital dan AI, konsentrasi kekuasaan korporasi menjadi semakin penting, sehingga isu pertumbuhan tidak lagi dapat dipisahkan dari isu distribusi, kedaulatan data, pasar tenaga kerja, dan legitimasi politik. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, penurunan kemiskinan menjadi 8,25 persen, dan turunnya gini ratio menjadi 0,363 menunjukkan capaian yang berarti, tetapi belum menghapus persoalan kerentanan sosial, dualisme wilayah, dan tantangan institusional. Makalah ini menyimpulkan bahwa ekonomi politik kontemporer harus dibaca sebagai upaya mencari keseimbangan baru: negara yang strategis tetapi akuntabel, pasar yang produktif tetapi tidak oligarkis, serta masyarakat yang adaptif tetapi tetap terlindungi. ([IMF](#))

Kata kunci: *ekonomi politik, pertumbuhan, ketimpangan, kekuasaan, geoeconomics, demokrasi, AI, Indonesia*

Ekonomi Politik Kontemporer: Antara Pertumbuhan, Ketimpangan, dan Kekuasaan

1. Pendahuluan

Ekonomi politik kontemporer lahir dari kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Di balik angka PDB, inflasi, ekspor, investasi, atau tingkat pengangguran, selalu terdapat keputusan politik, desain kelembagaan, distribusi hak, serta relasi kuasa yang menentukan siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya perubahan. Dalam pengertian ini, ekonomi bukan sekadar persoalan produksi dan konsumsi, melainkan juga persoalan otoritas: siapa yang menetapkan aturan, siapa yang menguasai sumber daya strategis, siapa yang dapat

memengaruhi regulasi, dan siapa yang memiliki kemampuan bertahan ketika terjadi guncangan. Karena itu, membicarakan ekonomi tanpa politik akan menghasilkan analisis yang terlalu mekanis, sedangkan membicarakan politik tanpa ekonomi akan kehilangan pijakan materialnya. ([IMF](#))

Dunia hari ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ekonomi dan politik saling menjalin. IMF menggambarkan 2025 sebagai tahun yang "fluid and volatile," ditandai penataan ulang prioritas kebijakan di Amerika Serikat dan penyesuaian di berbagai ekonomi lain. WTO menegaskan bahwa tarif yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan telah cukup untuk menurunkan prospek perdagangan dunia pada 2025. Di luar itu, survei yang dilaporkan Reuters pada April 2026 menunjukkan bahwa hampir 70 persen bank sentral kini memandang ketegangan geopolitik sebagai risiko global utama, jauh lebih tinggi dibanding 35 persen pada 2024. Ini menunjukkan bahwa bagi pengambil kebijakan moneter dan fiskal sekalipun, variabel geopolitik kini tidak lagi dianggap eksternal, melainkan bagian inti dari stabilitas ekonomi. ([IMF](#))

Perkembangan pada 6–7 April 2026 bahkan mempertegas keterkaitan tersebut. IMF Managing Director Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah akan mendorong harga lebih tinggi dan pertumbuhan lebih lambat, sementara Presiden Bank Dunia Ajay Banga menyebut konflik yang sama dapat memangkas pertumbuhan global dan menaikkan inflasi, tergantung durasi serta kedalaman disrupsi pasar energi. Bagi negara pengimpor energi dan negara dengan ruang fiskal sempit, dampaknya bisa sangat berat karena menggerus daya beli, memperburuk neraca eksternal, dan memicu tekanan sosial. Dengan demikian, ekonomi politik kontemporer bukan sekadar tema akademik, tetapi cara membaca kenyataan sehari-hari yang termanifestasi dalam harga BBM, nilai tukar, ongkos logistik, dan kestabilan rumah tangga. ([Reuters](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan bagaimana ekonomi politik kontemporer dapat dipahami melalui tiga poros utama: pertumbuhan, ketimpangan, dan kekuasaan. Pertumbuhan penting karena tanpa ekspansi ekonomi, ruang fiskal dan sosial bagi pembangunan menjadi terbatas. Ketimpangan penting karena pertumbuhan yang tidak terdistribusi akan mengikis legitimasi dan memperbesar konflik. Kekuasaan penting karena pasar tidak pernah netral; ia dibentuk oleh negara, korporasi, hukum, teknologi, dan konfigurasi global. Melalui ketiga poros itu, makalah ini berupaya menunjukkan bahwa dunia yang sedang berubah menuntut cara pandang baru yang melampaui dikotomi lama antara negara versus pasar. ([Human Development Reports](#))

2. Metode dan Pendekatan Penulisan

Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Sumber utama yang digunakan berasal dari laporan lembaga internasional dan nasional yang memiliki otoritas statistik serta analisis kebijakan, seperti IMF, WTO, UNDP, ILO, V-Dem, Bank Dunia, dan BPS. Pendekatan ini dipilih karena tema ekonomi politik kontemporer menuntut pembacaan lintas-bidang: makroekonomi, perdagangan internasional, pembangunan manusia, demokrasi, persaingan usaha, dan transformasi digital. Dengan menggabungkan sumber-sumber tersebut, tulisan ini tidak hanya memotret tren ekonomi, tetapi juga menghubungkannya dengan perubahan struktur kekuasaan dan dampak sosialnya. ([IMF](#))

Secara metodologis, makalah ini tidak bermaksud menguji hipotesis kuantitatif tertentu, melainkan membangun sintesis argumentatif. Artinya, data digunakan untuk mendukung pembacaan konseptual mengenai bagaimana pertumbuhan, ketimpangan, dan kekuasaan saling memengaruhi. Karena dunia sedang berubah cepat, terutama pada April 2026, makalah ini juga memasukkan beberapa perkembangan mutakhir untuk memperlihatkan bahwa analisis ekonomi politik bukan refleksi yang

statis. Dengan demikian, tulisan ini berada di persimpangan antara kajian teoritik dan pembacaan kebijakan yang kontekstual. ([Reuters](#))

3. Kerangka Konseptual: Mengapa Ekonomi Harus Dibaca Secara Politik

Secara klasik, ekonomi sering dipresentasikan sebagai persoalan efisiensi: bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Namun pendekatan ekonomi politik menolak anggapan bahwa efisiensi adalah satu-satunya lensa. Ia menegaskan bahwa alokasi sumber daya selalu dibungkus oleh relasi institusional dan politik. Pajak, subsidi, hak monopoli, kebijakan industri, privatisasi, perlindungan sosial, bahkan definisi kepemilikan data, semuanya merupakan hasil keputusan politik. Dalam kerangka ini, pasar bukan wilayah "alami" yang bekerja sendiri, melainkan konstruksi sosial yang membutuhkan hukum, aparat, infrastruktur, dan legitimasi. ([World Trade Organization](#))

Cara pandang ini penting karena banyak gejala kontemporer tidak dapat dijelaskan semata melalui teori pasar persaingan sempurna. Ketika WTO memperkirakan kontraksi perdagangan barang dunia pada 2025, masalahnya bukan sekadar melemahnya permintaan, tetapi juga tarif tinggi dan ketidakpastian kebijakan. Ketika IMF memproyeksikan perlambatan pertumbuhan global, ia secara eksplisit mengaitkannya dengan perubahan prioritas kebijakan, penyesuaian lintas-negara, dan guncangan yang didorong politik. Artinya, pergerakan ekonomi global kini sangat bergantung pada tindakan negara dan respons aktor swasta terhadap negara. ([World Trade Organization](#))

Ekonomi politik juga menyoroti bahwa pertanyaan distribusi sama pentingnya dengan pertanyaan produksi. Sebuah negara dapat bertumbuh, tetapi bila manfaat pertumbuhan terlalu terkonsentrasi, maka legitimasi institusi akan melemah. Sebuah perusahaan dapat menciptakan inovasi besar, tetapi bila ia sekaligus memusatkan akses data, menutup

pasar, dan menggerus privasi, maka dampaknya tidak lagi sekadar ekonomis, melainkan politis. Di era digital, persoalan ini makin tajam karena kekuasaan tidak lagi hanya terletak pada pabrik, tanah, atau sumber daya alam, tetapi juga pada jaringan, platform, algoritma, dan kapasitas komputasi. ([World Bank](#))

Dengan demikian, ekonomi politik kontemporer dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana pertumbuhan dibentuk oleh kekuasaan, bagaimana ketimpangan memengaruhi stabilitas sosial, dan bagaimana institusi menentukan siapa yang diuntungkan dari transformasi ekonomi. Kerangka ini sangat relevan dalam dunia yang tidak lagi bergerak ke arah liberalisasi linier, tetapi ke arah fragmentasi, proteksionisme strategis, dan kompetisi teknologi. ([World Trade Organization](#))

4. Pertumbuhan dalam Dunia yang Penuh Retakan

Pertumbuhan masih merupakan tujuan pokok hampir semua negara, sebab tanpa pertumbuhan akan sulit memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, membiayai pendidikan, atau menjaga stabilitas fiskal. Namun pertumbuhan kontemporer berlangsung dalam konteks yang jauh lebih rapuh dibanding dua atau tiga dekade lalu. IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. Angka ini tidak menunjukkan keruntuhan, tetapi menunjukkan bahwa ekonomi dunia tumbuh di bawah potensi, dan lebih penting lagi, tumbuh dalam suasana yang rentan terhadap guncangan kebijakan dan geopolitik. ([IMF](#))

WTO memberikan gambaran yang lebih keras dari sisi perdagangan. Setelah memperhitungkan tarif baru dan lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, WTO memproyeksikan volume perdagangan barang dunia 2025 berkontraksi 0,2 persen. Bahkan dalam skenario yang lebih buruk, kontraksi bisa mencapai 1,5 persen. Ini penting karena perdagangan internasional selama puluhan tahun dipandang sebagai mesin pertumbuhan. Ketika perdagangan melemah bukan karena kegagalan

pasar alamiah, tetapi karena desain kebijakan yang semakin konfrontatif, maka pertumbuhan pun menjadi lebih bergantung pada strategi domestik dan daya tahan internal masing-masing negara. ([World Trade Organization](#))

UNDP menambahkan dimensi lain: sekalipun ekonomi masih bertumbuh, perkembangan manusia tidak otomatis mengikutinya dengan kecepatan yang sama. Human Development Report 2025 menyatakan bahwa kenaikan HDI global berada pada laju terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu. Selain itu, kesenjangan antara negara dengan HDI sangat tinggi dan sangat rendah kembali melebar selama empat tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi sekarang cenderung kurang transformatif dibanding masa-masa sebelumnya; ia tidak dengan sendirinya menghasilkan perbaikan setara dalam pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. ([Human Development Reports](#))

Pada April 2026, tantangan itu diperparah oleh risiko energi dan perang. Reuters melaporkan peringatan IMF bahwa konflik di Timur Tengah akan memicu inflasi lebih tinggi dan pertumbuhan lebih lambat, bahkan jika penyelesaiannya relatif cepat. Reuters juga mengutip Presiden Bank Dunia yang menyatakan konflik tersebut bisa mengurangi global GDP sebesar 0,3–1 persen dan menaikkan inflasi hingga 0,9 poin persentase, tergantung tingkat disrupsi energi. Dalam pembacaan ekonomi politik, hal ini sangat penting: pertumbuhan tidak semata-mata ditentukan produktivitas, tetapi juga oleh keamanan jalur energi, posisi strategis negara, dan kapasitas fiskal untuk menyerap guncangan. ([Reuters](#))

Pertumbuhan kontemporer, dengan demikian, memiliki sifat paradoksal. Di satu sisi, teknologi dan globalisasi seharusnya meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, justru efisiensi itu kini diganggu oleh pertimbangan keamanan, tarif, kontrol ekspor, dan pembatasan teknologi. Akibatnya, dunia bergerak dari globalisasi berbasis biaya rendah menuju globalisasi berbasis ketahanan. Perusahaan tidak lagi sekadar mencari lokasi termurah, tetapi lokasi yang aman secara geopolitik dan regulatori. Di balik perubahan

strategi bisnis ini, kita melihat bagaimana kekuasaan negara kembali menentukan arah pasar. ([World Trade Organization](#))

5. Ketimpangan sebagai Masalah Ekonomi dan Politik

Ketimpangan sering dianggap hanya sebagai isu distribusi pendapatan. Padahal dalam ekonomi politik, ketimpangan adalah persoalan yang jauh lebih luas: ia memengaruhi stabilitas sosial, kepercayaan publik, daya tawar politik, dan bahkan kualitas demokrasi. Bila pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok atas, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam ketidakpastian, maka sistem ekonomi akan tampak berhasil di atas kertas tetapi rapuh dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ketimpangan menciptakan dua dunia sekaligus: satu dunia bagi mereka yang memiliki aset, akses, dan perlindungan; dan dunia lain bagi mereka yang hidup dari upah, kerja informal, atau usaha kecil rentan. ([Human Development Reports](#))

Laporan ILO tahun 2025 memperlihatkan sisi konkret dari persoalan ini. Tingkat pengangguran global tetap 5 persen pada 2024, tetapi pengangguran kaum muda tetap tinggi di 12,6 persen. ILO juga menegaskan bahwa kerja informal dan working poverty telah kembali ke tingkat pra-pandemi, dan negara-negara berpendapatan rendah menghadapi kesulitan terbesar dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Dengan kata lain, pasar tenaga kerja global mungkin tidak kolaps, tetapi juga belum cukup kuat untuk menghasilkan rasa aman sosial yang luas. Ketika pekerjaan tersedia namun berkualitas rendah, maka pertumbuhan tidak otomatis menjadi kesejahteraan. ([International Labour Organization](#))

Ketimpangan bukan hanya hasil mekanisme pasar; ia juga dibentuk oleh akses terhadap pendidikan, kepemilikan aset, kebijakan pajak, perlindungan tenaga kerja, dan struktur pasar. Dalam ekonomi digital, ketimpangan memperoleh dimensi baru. Mereka yang memiliki akses ke data, komputasi, dan jaringan global akan menikmati produktivitas dan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang hanya menjadi

pengguna pasif akan tertinggal. Karena itu, ketimpangan digital tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan sosial secara umum. ([World Bank](#))

UNDP mengingatkan bahwa AI dapat menjadi sumber kemajuan, tetapi hasil akhirnya tergantung pilihan kebijakan. Laporan itu menolak determinisme teknologi dan menekankan bahwa manusia tetap berada di pusat pembangunan. Pesan ini penting bagi pembacaan ketimpangan: teknologi tidak otomatis mempersempit jarak sosial. Tanpa institusi yang tepat, teknologi justru dapat memperbesar konsentrasi keuntungan, menekan upah tertentu, dan menggeser pekerjaan tanpa menyediakan transisi yang adil. ([Human Development Reports](#))

Di sinilah ketimpangan menjadi masalah politik. Warga yang merasa tertinggal lebih mudah kehilangan kepercayaan pada institusi, lebih mudah menerima narasi populis, dan lebih mudah melihat elite ekonomi-politik sebagai kelompok tertutup yang bekerja untuk dirinya sendiri. Ketimpangan yang tinggi juga memberi kelompok kaya kemampuan lebih besar untuk memengaruhi regulasi, media, dan pembentukan opini. Akibatnya, lingkaran ketimpangan menjadi semakin kuat: kekayaan menghasilkan pengaruh, pengaruh menghasilkan kebijakan yang menguntungkan, dan kebijakan itu memperkuat kekayaan. Ekonomi politik kontemporer justru harus dibaca dari lingkaran seperti ini. ([v-dem.net](#))

6. Kekuasaan: Negara, Elite, dan Geoeconomics

Dalam banyak pembahasan populer, globalisasi pernah diasumsikan membuat negara semakin tidak relevan. Kenyataannya, negara justru kembali menjadi aktor strategis. Bukan dalam arti semua negara menjadi lebih kuat secara otomatis, tetapi dalam arti keputusan negara tentang tarif, subsidi, pembatasan ekspor, investasi infrastruktur, regulasi digital, dan keamanan energi kini sangat menentukan arah pasar. IMF secara eksplisit menyebut penataan ulang prioritas kebijakan di Amerika Serikat dan penyesuaian kebijakan negara lain sebagai faktor utama dinamika ekonomi 2025. WTO pun menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan,

bukan sekadar permintaan pasar, menjadi sumber utama perubahan prospek perdagangan dunia. ([IMF](#))

Fenomena ini dapat disebut sebagai kembalinya geoeconomics: penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis dan politik. Dalam konteks ini, chip, mineral kritis, cloud, pelayaran, data, bahkan fertiliser, bukan lagi sekadar komoditas atau jasa, melainkan aset strategis. Reuters pada April 2026 menggarisbawahi bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya mengganggu pasokan minyak dan gas, tetapi juga berdampak pada pupuk dan rantai pasok lain yang penting bagi banyak negara. Ini menunjukkan bahwa jalur ekonomi global merupakan medan kuasa. Mereka yang mengendalikan choke points memperoleh leverage yang besar terhadap ekonomi dunia. ([Reuters](#))

Namun kekuasaan negara tidak selalu identik dengan kepentingan publik. Dalam banyak kasus, negara dapat menjadi alat konsolidasi elite. Kebijakan industri dapat digunakan untuk memperluas kapasitas nasional, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan rente bagi kelompok dekat kekuasaan. Kontrol atas sumber daya alam dapat dipakai untuk pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat digunakan untuk patronase politik. Karena itu, pertanyaan sentral ekonomi politik bukan hanya "apakah negara hadir," melainkan "negara hadir untuk siapa dan dengan akuntabilitas seperti apa." ([v-dem.net](#))

V-Dem memberikan konteks kelembagaan yang penting. Democracy Report 2026 menyatakan bahwa 74 persen populasi dunia hidup dalam autokrasi, hanya 7 persen hidup dalam demokrasi liberal, dan kebebasan berekspresi terus menjadi aspek demokrasi yang paling banyak diserang. Dalam kondisi seperti itu, negara strategis mudah bergeser menjadi negara yang menutup kritik. Padahal kebijakan ekonomi yang kuat justru membutuhkan mekanisme koreksi. Negara tanpa akuntabilitas dapat terlihat efisien dalam jangka pendek, tetapi rentan menghasilkan kebijakan eksklusif, represi, dan pemborosan sumber daya. ([v-dem.net](#))

Karena itu, hubungan antara pertumbuhan dan kekuasaan selalu ambivalen. Pertumbuhan membutuhkan kapasitas negara, tetapi kapasitas negara tanpa pembatasan dapat menggerus kebebasan. Pasar membutuhkan kepastian hukum, tetapi kepastian hukum tanpa partisipasi dapat berubah menjadi kepastian bagi elite. Maka, inti ekonomi politik kontemporer terletak pada pencarian keseimbangan antara efektivitas dan legitimasi. (v-dem.net)

7. Pasar dan Korporasi Digital: Wajah Baru Kekuasaan Ekonomi

Salah satu perubahan terbesar abad ini adalah bergesernya pusat gravitasi ekonomi dari sektor fisik semata menuju infrastruktur digital. Namun transformasi ini tidak menghasilkan pasar yang otomatis lebih kompetitif. Sebaliknya, banyak indikator menunjukkan kecenderungan konsentrasi. Bank Dunia dalam kajian tentang antitrust dan platform digital menunjukkan bahwa lalu lintas data internet global sangat terkonsentrasi; enam perusahaan berbasis di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 40 persen arus data internet dunia. Dalam sampel 17 negara berpendapatan rendah dan menengah, sekitar 60 persen dari 25 situs teratas dimiliki oleh lima perusahaan AS. Ini adalah fakta ekonomi sekaligus fakta politik, sebab kontrol atas arus data berarti kontrol atas perhatian, iklan, perilaku konsumsi, dan sebagian pembentukan opini publik. (World Bank)

Konsentrasi seperti ini menantang asumsi klasik bahwa pasar digital selalu menurunkan hambatan masuk. Memang biaya distribusi digital bisa sangat rendah, tetapi efek jaringan, data skala besar, kepemilikan cloud, dan akuisisi terhadap pesaing potensial justru menciptakan hambatan masuk baru yang sangat tinggi. Karena itu, Bank Dunia menekankan bahwa di pasar digital, isu persaingan tidak cukup dinilai dari harga, tetapi juga dari kualitas, privasi, perlindungan data, dan risiko pengambilalihan anti-persaingan. Pasar mungkin terlihat "gratis" bagi konsumen, tetapi biaya sesungguhnya dibayar melalui data, keterikatan ekosistem, dan berkurangnya pilihan. (World Bank)

OECD Competition Trends 2025 memperlihatkan bahwa otoritas persaingan di berbagai yurisdiksi terus memperbesar anggaran dan personel, yang mencerminkan meningkatnya kompleksitas pasar dan penegakan hukum persaingan. Meskipun laporan itu fokus pada tren penegakan sepanjang 2023, pesannya tetap relevan: struktur pasar global menuntut negara memiliki kemampuan regulasi yang lebih canggih, khususnya dalam menghadapi ekonomi platform dan merger yang mempengaruhi dinamika jangka panjang. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa pasar modern tidak bisa dilepas begitu saja dari negara. ([OECD](#))

Dalam perspektif ekonomi politik, korporasi digital menempati posisi unik. Mereka bukan hanya produsen barang atau jasa, tetapi juga operator infrastruktur sosial. Mesin pencari menentukan apa yang mudah ditemukan. Media sosial menentukan apa yang mudah tersebar. Platform perdagangan menentukan visibilitas penjual. Layanan cloud menentukan siapa yang dapat berkomputasi dalam skala besar. Ketika semua itu terkonsentrasi, kuasa ekonomi dan kuasa kultural saling mengunci. Karena itu, isu platform bukan lagi soal bisnis semata, melainkan tata kelola publik. ([World Bank](#))

8. AI, Produktivitas, dan Ketimpangan Baru

AI merupakan frontier paling menentukan dalam ekonomi politik kontemporer. World Bank Digital Progress and Trends Report 2025 menyatakan bahwa AI sedang membentuk ulang bagaimana orang belajar, bekerja, dan hidup. Namun laporan yang sama menegaskan bahwa negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi tantangan besar untuk mengadopsi atau menerapkan AI secara efektif dan dalam skala luas. Artinya, AI bukan hanya peluang teknologi, tetapi juga ujian kapasitas nasional. ([World Bank](#))

Bank Dunia merumuskan empat fondasi utama AI, yaitu connectivity, compute, context, dan competency. Connectivity berarti listrik, internet, dan perangkat yang andal. Compute berarti chip, server, data center, dan

cloud. Context berarti data lokal dan penggunaan yang relevan dengan kebutuhan setempat. Competency berarti keterampilan manusia yang memungkinkan masyarakat tidak hanya memakai, tetapi juga mengembangkan dan mengawasi AI. Kerangka ini sangat penting, karena ia menunjukkan bahwa AI tidak sekadar aplikasi di layar, melainkan sistem produksi baru yang membutuhkan infrastruktur, kebijakan, dan investasi jangka panjang. ([World Bank](#))

UNCTAD menambahkan bahwa pasar AI diproyeksikan mencapai US\$4,8 triliun pada 2033. Namun manfaatnya sangat terkonsentrasi. Seratus perusahaan, terutama di AS dan Tiongkok, menyumbang sekitar 40 persen belanja R&D korporasi global. Selain itu, 118 negara tidak terwakili dalam diskusi utama tata kelola AI. Ini berarti AI berkembang dalam geografi kekuasaan yang timpang. Banyak negara akan menjadi pengguna, tetapi sedikit negara yang menjadi pembentuk standar, pemilik model, dan pengendali infrastruktur. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ada paradoks di sini. AI berpotensi meningkatkan produktivitas, memperluas akses layanan, dan menurunkan biaya tertentu. Tetapi bila kepemilikan teknologinya terkonsentrasi, keuntungannya pun akan terkonsentrasi. Negara yang hanya menjadi pasar pengguna akan membayar lisensi, menyumbang data, dan menyesuaikan diri dengan standar eksternal. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan baru akan terdorong ke segmen kerja lebih rapuh. Karena itu, AI dapat memperbesar pertumbuhan sekaligus memperdalam ketimpangan. Pertanyaan ekonomi politiknya adalah: siapa yang memiliki compute, siapa yang menguasai data, dan siapa yang menetapkan norma tata kelolanya? ([World Bank](#))

Menariknya, Bank Dunia mencatat bahwa lebih dari 40 persen lalu lintas global ChatGPT pada pertengahan 2025 berasal dari negara berpendapatan menengah, termasuk Indonesia, Brasil, dan Filipina. Ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak selalu menunggu negara menjadi kaya. Namun adopsi pengguna tidak sama dengan kedaulatan

teknologi. Negara dapat sangat aktif memakai AI tetapi tetap bergantung pada infrastruktur, model, dan platform yang dimiliki pihak luar. Dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini merupakan persoalan kekuasaan ekonomi. ([World Bank](#))

9. Demokrasi, Representasi, dan Krisis Legitimasi

Hubungan antara pertumbuhan dan legitimasi tidak pernah otomatis. Negara dapat tumbuh, tetapi bila warga merasa sistem tidak adil, rasa percaya akan menurun. Di sinilah demokrasi memainkan peran besar. Demokrasi idealnya menyediakan mekanisme koreksi terhadap ketimpangan, penangkapan kebijakan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun V-Dem menunjukkan bahwa tren global justru bergerak ke arah sebaliknya. Pada 2025, 92 negara tergolong autokrasi, 87 negara tergolong demokrasi, dan rata-rata warga dunia hidup pada tingkat demokrasi yang setara dengan tahun 1978. ([v-dem.net](#))

Kemunduran demokrasi tidak bisa dibaca hanya sebagai masalah politik normatif; ia juga punya konsekuensi ekonomi. Bila kebebasan berekspresi melemah, maka ruang bagi kritik terhadap kebijakan ekonomi juga menyempit. Bila media, serikat, dan oposisi dipersempit, maka kebijakan yang menguntungkan elite menjadi lebih mudah lolos tanpa pengawasan. Bila pemilu masih ada tetapi partisipasi substansial melemah, maka demokrasi berubah menjadi prosedur tanpa koreksi sosial yang memadai. V-Dem menyebut kebebasan berekspresi sebagai aspek demokrasi yang paling banyak diserang, memburuk di 44 negara pada 2025. ([v-dem.net](#))

Krisis representasi ini diperkuat oleh ekonomi digital. Platform yang seharusnya memperluas ruang publik justru sering mempercepat polarisasi, memperkuat disinformasi, dan memberi keuntungan pada konten ekstrem atau emosional. Dalam masyarakat yang sudah dilanda ketimpangan dan ketidakpastian kerja, polarisasi digital mempercepat frustrasi politik. Karena itu, kemunduran demokrasi hari ini tidak dapat dipisahkan dari struktur

ekonomi digital yang terkonsentrasi. Lagi-lagi, pasar dan politik bertemu. ([World Bank](#))

Secara lebih substantif, krisis legitimasi juga muncul ketika pertumbuhan gagal menjawab pengalaman hidup warga. Rumah tangga tidak menilai ekonomi dari angka pertumbuhan semata, tetapi dari harga kebutuhan pokok, peluang kerja anak muda, akses perumahan, kualitas layanan kesehatan, dan rasa aman masa depan. Karena itu, pertumbuhan yang cukup tinggi sekalipun dapat gagal membangun legitimasi bila distribusinya buruk atau bila volatilitas terlalu besar. Ekonomi politik kontemporer mengingatkan bahwa stabilitas sejati bukan sekadar stabilitas harga, melainkan juga stabilitas harapan sosial. ([International Labour Organization](#))

10. Indonesia: Antara Capaian Makro dan Kerentanan Struktural

Indonesia memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana negara berkembang besar menavigasi perubahan global. BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dari 5,03 persen pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa basis domestik Indonesia masih cukup kuat, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor barang-jasa. Dalam konteks global yang melambat, angka ini merupakan pencapaian yang berarti. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi distribusi sosial, juga terdapat perkembangan positif. BPS menyatakan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Gini ratio juga turun menjadi 0,363, lebih rendah daripada 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Data ini menunjukkan bahwa secara agregat Indonesia mengalami perbaikan baik pada pertumbuhan maupun distribusi pengeluaran. Ini penting karena tidak semua negara mampu mencapai keduanya secara bersamaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun capaian itu tidak boleh dibaca secara terlalu optimistis. BPS juga menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas perkotaan 6,60 persen. Ketimpangan perkotaan juga masih lebih tinggi dibanding perdesaan, tercermin dari gini ratio perkotaan 0,383. Artinya, ekonomi Indonesia tetap menyimpan dualisme: antara kota dan desa, antara sektor formal dan informal, antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran. Pertumbuhan nasional yang cukup tinggi belum otomatis menghapus kerentanan struktural ini. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perkembangan April 2026 memberi pelajaran tambahan tentang keterpaparan Indonesia terhadap guncangan global. Reuters melaporkan bahwa pada 7 April 2026 Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas setelah rupiah menyentuh rekor terendah Rp17.090 per dolar AS. Pelemahan tersebut dikaitkan dengan faktor global, termasuk reaksi pasar terhadap perang Iran dan lonjakan risiko energi. Bagi Indonesia sebagai pengimpor energi bersih pada sejumlah komponen, gejolak semacam ini dapat memengaruhi inflasi impor, biaya produksi, serta sentimen investor. Dengan demikian, bahkan ketika fundamental domestik membaik, kerentanan eksternal tetap kuat. ([Reuters](#))

Indonesia juga berada pada posisi strategis dalam ekonomi digital. World Bank mencatat bahwa Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah dengan penggunaan AI generatif yang tinggi. Ini adalah peluang besar bagi pendidikan, UMKM, produktivitas, dan layanan publik. Tetapi peluang itu hanya akan menjadi nilai tambah nasional bila Indonesia juga membangun fondasi AI: konektivitas, komputasi, data lokal, dan talenta. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi pasar pengguna yang besar, tetapi tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai digital. ([World Bank](#))

Dalam pembacaan ekonomi politik, Indonesia menghadapi tugas ganda. Di satu sisi, ia harus mempertahankan pertumbuhan dan memperluas

pemerataan. Di sisi lain, ia harus membangun kapasitas strategis agar tidak sekadar menjadi objek dari perubahan global. Ini berarti kebijakan industri, hilirisasi, perlindungan sosial, reformasi pendidikan, tata kelola digital, dan kualitas demokrasi harus dilihat sebagai satu paket, bukan agenda yang terpisah-pisah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

11. Agenda Kebijakan: Menuju Ekonomi Politik yang Lebih Berkeadilan

Pelajaran utama dari ekonomi politik kontemporer adalah perlunya keseimbangan baru antara efisiensi, keadilan, dan legitimasi. Agenda pertama adalah memperkuat kapasitas negara secara selektif dan akuntabel. Dunia yang terfragmentasi menuntut negara mampu menjaga stabilitas makro, mengelola risiko energi dan pangan, serta membangun sektor strategis. Namun penguatan negara harus dibarengi transparansi, evaluasi, dan pengawasan publik agar tidak berubah menjadi rente dan patronase. Negara yang strategis perlu dibedakan dari negara yang predatoris. ([World Trade Organization](#))

Agenda kedua adalah membangun kontrak sosial baru untuk pasar tenaga kerja. ILO menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya jumlah pekerjaan, tetapi kualitas kerja, tingginya pengangguran kaum muda, serta kembalinya kerja informal dan working poverty ke tingkat pra-pandemi. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus bergerak dari sekadar penciptaan pekerjaan ke pembangunan pekerjaan yang layak. Pendidikan vokasi, reskilling, perlindungan pekerja platform, dukungan UMKM produktif, dan jaminan sosial adaptif harus menjadi bagian dari strategi pertumbuhan. ([International Labour Organization](#))

Agenda ketiga adalah menata ulang pasar digital dan AI. Bank Dunia dan UNCTAD sama-sama menegaskan bahwa manfaat AI tidak akan terdistribusi secara otomatis, sementara struktur digital global sangat terkonsentrasi. Maka kebijakan persaingan, perlindungan data, investasi data center, interoperabilitas, dan pengembangan talenta AI harus menjadi

agenda ekonomi nasional, bukan sekadar agenda teknis kementerian tertentu. Jika tidak, negara berkembang hanya akan menjadi pemasok data dan pasar konsumsi bagi model-model global. ([World Bank](#))

Agenda keempat adalah memulihkan legitimasi demokrasi melalui hasil yang nyata. V-Dem menunjukkan bahwa demokrasi sedang tertekan secara global. Dalam situasi ini, demokrasi harus membuktikan kemampuannya menghasilkan kebijakan yang efektif, adil, dan komunikatif. Demokrasi yang hanya prosedural tetapi gagal menjawab kecemasan ekonomi akan mudah tersingkir oleh otoritarianisme yang menjanjikan ketertiban. Sebaliknya, negara yang menutup kritik akan kehilangan kemampuan belajar. Maka jalan ke depan bukan memilih salah satunya, tetapi menggabungkan kapasitas negara dengan kebebasan dan akuntabilitas. ([v-dem.net](#))

Agenda kelima, khusus untuk Indonesia, adalah memastikan bahwa pertumbuhan 5 persen tidak berhenti sebagai keberhasilan makro, tetapi diterjemahkan menjadi mobilitas sosial, transformasi produktivitas, dan penurunan kerentanan wilayah. Itu berarti pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga pada produktivitas industri, kualitas SDM, logistik, dan transformasi digital yang inklusif. Kebijakan pangan, energi, pendidikan, dan teknologi harus dibaca sebagai kebijakan ekonomi politik, karena semuanya menentukan siapa yang dapat naik kelas dan siapa yang tertinggal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

12. Penutup

Ekonomi politik kontemporer menunjukkan bahwa pertumbuhan, ketimpangan, dan kekuasaan bukan tiga tema yang terpisah, melainkan tiga sisi dari satu realitas yang sama. Pertumbuhan tanpa distribusi menghasilkan rasa tidak adil. Distribusi tanpa produktivitas tidak berkelanjutan. Kekuasaan tanpa akuntabilitas melahirkan dominasi elite. Dalam dunia yang sedang berubah—ditandai perlambatan global, fragmentasi perdagangan, perang energi, konsentrasi digital, dan

kemunduran demokrasi—hubungan antara ketiganya menjadi semakin nyata. ([IMF](#))

Makalah ini menegaskan bahwa membaca ekonomi politik hari ini berarti membaca siapa yang membentuk pasar, siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan, dan siapa yang membayar ongkos perubahan. Data IMF, WTO, UNDP, ILO, Bank Dunia, dan V-Dem memperlihatkan gambaran yang konsisten: dunia masih bertumbuh, tetapi bertumbuh dalam keadaan rapuh; inovasi terus berlangsung, tetapi dalam struktur yang timpang; dan negara kembali strategis, tetapi sering tanpa diimbangi penguatan akuntabilitas. ([IMF](#))

Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan mengubah pertumbuhan menjadi fondasi keadilan sosial dan kemandirian strategis. Perbaikan kemiskinan dan ketimpangan pada 2025 adalah sinyal positif, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan dualisme wilayah, kualitas kerja, dan posisi Indonesia dalam ekonomi digital global. Karena itu, pembangunan ke depan harus dirancang bukan hanya sebagai proyek ekspansi ekonomi, tetapi juga sebagai proyek pembenahan relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada akhirnya, ekonomi politik kontemporer mengajarkan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh satu indikator tunggal. Ia ditentukan oleh kualitas institusi, kedalaman strategi nasional, kemampuan masyarakat beradaptasi, dan keberanian politik untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak menjadi hak istimewa segelintir orang. Dunia yang berubah memerlukan negara yang kuat tetapi tidak sewenang-wenang, pasar yang inovatif tetapi tidak monopolistik, dan masyarakat yang produktif tetapi tidak dibiarkan menanggung sendiri seluruh risiko zaman. Itulah inti pencarian ekonomi politik kontemporer. ([v-dem.net](#))

Glosarium

Autokrasi

Sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada sedikit aktor dan membatasi kompetisi politik, kebebasan sipil, atau mekanisme akuntabilitas. (v-dem.net)

Demokrasi liberal

Bentuk demokrasi yang bukan hanya memiliki pemilu, tetapi juga rule of law, checks and balances, perlindungan hak sipil, dan kebebasan berekspresi. (v-dem.net)

Ekonomi digital

Kegiatan ekonomi yang bertumpu pada data, platform, jaringan internet, layanan digital, dan komputasi berbasis cloud. (World Bank)

Ekonomi politik

Pendekatan analitis yang mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan, institusi, pasar, distribusi sumber daya, dan kesejahteraan sosial. (IMF)

Geoeconomics

Penggunaan instrumen ekonomi seperti tarif, sanksi, investasi, kontrol ekspor, dan rantai pasok untuk tujuan strategis dan politik. (World Trade Organization)

Gini ratio

Ukuran statistik ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; semakin tinggi angkanya, semakin timpang distribusinya. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

HDI (Human Development Index)

Indeks pembangunan manusia yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. ([Human Development Reports](#))

Kerja informal

Pekerjaan yang tidak atau belum terlindungi secara memadai oleh aturan formal ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial. ([International Labour Organization](#))

Konsentrasi pasar

Keadaan ketika pangsa pasar, data, atau infrastruktur penting dikuasai oleh sedikit perusahaan atau aktor. ([World Bank](#))

Legitimasi politik

Derajat penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah atau institusi sebagai sah dan layak ditaati. ([v-dem.net](#))

Perlindungan sosial

Serangkaian kebijakan untuk melindungi warga dari risiko ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, sakit, atau kehilangan pendapatan.

([International Labour Organization](#))

Rantai pasok

Jaringan produksi, logistik, distribusi, dan perdagangan yang menghubungkan pemasok, produsen, dan konsumen. ([World Trade Organization](#))

Small AI

Pendekatan AI yang lebih hemat biaya, lebih ringan, dan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, terutama untuk negara berkembang.

([World Bank](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.*

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025.* ILO.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim.* IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD competition trends 2025.* OECD.

Reuters. (2026, April 7). *Central banks' concern over rising geopolitical tensions surges, survey shows.*

Reuters. (2026, April 7). *Indonesia's central bank intervenes in FX market after the rupiah hits a record low.*

Reuters. (2026, April 6). *Middle East war means "all roads" lead to higher prices, slower growth, IMF chief says.*

Reuters. (2026, April 7). *World Bank's Banga sees some degree of lower growth, higher inflation due to war.*

United Nations Conference on Trade and Development. (2025, April 7). *AI's \$4.8 trillion future: UN Trade and Development alerts divides, urges action.*

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg.

World Bank. (2021). *Antitrust and digital platforms: An analysis of global patterns and approaches by competition authorities*. World Bank.

World Bank. (2025). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations*. World Bank.

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics, April 2025*. WTO.

Bacaan perkembangan terbaru yang relevan:

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>